

**SKRIPSI**

**STRATEGI POLANDIA DALAM PENANGANAN IMIGRAN**

**TAHUN 2015-2017**



**ASWIFAH**

**F0219502**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2023**

## ABSTRAK

Aswifah, (F0219502) dalam penelitian skripsi yang berjudul Strategi Polandia Dalam Penanganan Imigran Tahun 2015-2017, dibawah bimbingan Muhammad Nasir Badu, M.Hum,Ph.D selaku pembimbing I dan Andi Ismira, S.IP., M.A selaku pembimbing II pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Migrasi internasional merupakan salah satu isu dalam hubungan internasional, yang didasarkan pada dua hal yaitu integrasi wilayah dan komunitas di wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir terutama di Eropa terjadi peningkatan migrasi internasional yang memicu konflik di negara negara asal seperti Afrika dan negara negara timur tengah khususnya Suriah. Hal itu dilatar belakangi adanya krisis pengungsi akibat banjir di Eropa tahun 2015 hingga 2017. salah satu negara mengalami lonjakan imigran adalah Polandia. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi Polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015 hingga 2017 dan menganalisis dampak dari strategi Polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015 hingga 2017. Dengan menggunkan teori kebijakan publik, Dengan tipe penelitian yaitu deskriptif jenis penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Selain itu jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kebijakan yaitu kebijakan izin kerja, kebijakan visa, kebijakan pengembalian imigran, penolakan masuknya imigran, mencegah tindakan illegal, perlindungan perbatasan negara dan pengawasan penyebrangan perbatasan. Selain itu hasil dari penelitian ini juga menunjukkan dampak positif negatif yang diambil oleh pemerintah Polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015-2017. Adapun dampak positif negatif dari kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015-2017 yaitu dalam dampak positif negara Polandia mendapatkan kontribusi ekonomi dan peningkatan pendapatan dari imigran yang mendapatkan izin kerja. Dalam dampak negatif adanya diskriminasi terhadap imigran dari dalam dunia kerja dan adanya persaingan tenaga kerja imigran dengan pekerja lokal.

**Kata kunci:** *Eropa, Imigran, Kebijakan publik, Migrasi, Polandia, Pengungsi,*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Migrasi internasional merupakan salah satu isu dalam hubungan internasional yang muncul seiring meningkatnya pertukaran antar aktor dalam hubungan internasional, kejelasan perbatasan negara, dan melemahnya peluang migrasi. Selain itu, migrasi internasional merupakan bentuk pencarian masyarakat akan kehidupan yang lebih baik, yang didorong oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya populasi dunia, bertambahnya jumlah negara, revolusi atau kekacauan komunikasi dan transportasi. atau munculnya interperasi dan pergolakan dunia yang tidak menentu.<sup>1</sup> pertama, harus dipahami bahwa migrasi internasional didasarkan pada dua hal, yaitu integrasi wilayah dan komunitas diwilayah tersebut. Dalam hal ini, wilayah adalah negara dengan segala batas dan kedaulatannya, sedangkan keanggotaan merupakan status kewarganegaraan yang ada pada setiap orang, tergantung pada negara tempat tinggalnya yang ikut meratifikasi karena kelahiran atau kewarganegaraan orang tuanya. Tanpa mereka tidak akan ada imigrasi atau emigrasi.<sup>2</sup>

Meningkatnya migrasi internasional dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Eropa, muncul sebagai salah satu penyebab konflik atau perang terjadi di negara-negara Afrika dan timur tengah, terutama di negara-negara tempat

---

<sup>1</sup> Brian white A.A.Banyu perwita, yanya mochamad yani, ,(1997),*issues in world politics*, jurnal pengantar hubungan internasional halaman 150.

<sup>2</sup> Hampshire, J.(2023). *the politic of immigration*,cambridge: polity press

terjadinya perang, seperti Suriah. Sebagaimana dikemukakan oleh penulis sebelumnya, bahwa migrasi yang di dalamnya terdapat pengungsi sebagai subjek yang dapat didorong adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman dan keinginan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.<sup>3</sup>

Eropa adalah salah satu benua yang punya sejarah imigrasi besar-besaran yang dimana terdapat pada tahun 2015 hingga 2017 menjadi waktu yang signifikan dalam sejarah migrasi Eropa, dimana uni Eropa mengalami krisis migrasi yang tidak didahului. Krisis pengungsi dalam konflik di timur tengah dan Afrika utara memicu gelombang imigrasi besar-besaran ke negara-negara Eropa termasuk Polandia. Sebagai anggota negara uni Eropa, Polandia menjadi salah satu anggota negara yang mendapatkan permintaan kuota imigran yang paling banyak di antara anggota-anggota negara Uni Eropa lainnya.

Selain menggambarkan perubahan politik dan sosial yang memengaruhi strategi Polandia dalam menangani imigran pada tahun tersebut, penting juga untuk mempertimbangkan konteks regional dan peran Polandia dalam kerangka uni Eropa.<sup>4</sup> Peristiwa-peristiwa penting seperti krisis migrasi Eropa pada tahun 2015 penerapan kebijakan pengaturan migrasi oleh uni Eropa, dan perkembangan politik di negara-negara anggota lainnya memiliki dampak signifikan pada strategi Polandia.<sup>5</sup> selama periode 2015 hingga 2017, Polandia menghadapi tantangan dalam mengelola arus imigran. Beberapa tantangan tersebut meliputi penanganan pengungsi dan pencarian solusi jangka panjang bagi mereka, integrasi imigran ke

---

<sup>3</sup> Eurostat, (2017, 03, 04). *migrant crisis:migration to europe explined in seven charts*. Di akses pada 21 oktober 2022 dari <http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>

<sup>4</sup> Grabowska, B. (2019),*krisis migrasidan aturan hukum:polandia dan hungaria di dalam uni eropa* jurnal studi etnis dan migrasi, volume 45 no:13, 2557-2574.

<sup>5</sup> Grabowska, B.,& jakimow,t,(2019).*negara-negara grup visegrad dan krisis migrasi:terperangkap di antara solidaritas dan kepentingan pribadi*.jurnal studi eropa kontemporer, volume 27 no:03, 351-377.

dalam masyarakat Polandia, peningkatan keamanan perbatasan,serta koordinasi dengan anggota negara-negara uni Eropa dalam menghadapi krisis migrasi. Dalam hal ini, penelitian ini akan menggali strategi yang digunakan oleh Polandia dalam mengatasi tantangan pemikiran tentang strategi Polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015 hingga 2017 yang akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang kebijakan. ini berkaitan dengan tujuan sosial, politik dan ekonomi Polandia. Selain itu analisis ini dapat membantu melihat apakah strategi yang digunakan oleh Polandia berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik untuk pengembangan kebijakan masa depan.<sup>6</sup> Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dampak sosial, politik, dan ekonomi dari strategi tersebut. untuk itu penelitian ini diberi judul **”strategi polandia dalam penanganan imigran pada tahun 2015-2017”**.

## **1.2 Batasan dan Rumusan masalah**

### **1.2.1 Batasan masalah**

Untuk menghindari melebarnya topik pembahasan, maka penulis membatasi penelitian ini dengan berfokus pada strategi yang digunakan oleh polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015 hingga 2017. Karena pada tahun tersebut dimana negara Polandia menghadapi krisis imigrasi yang kompleks.

---

<sup>6</sup> Szuleka, M. (2017).*kebijakan krisis dan migrasi pasca aksesi:kasus polandia*.jurnal studi internasional dan keamanan eropa tengah, volume 11 no:01, 55-74.

### **1.2.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah penulis di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015- 2017?
2. Apa dampak dari strategi polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015- 2017?

### **1.3 Tujuan dan manfaat penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Dari latar belakang hingga rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Bagaimana strategi polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015 hingga 2017 dan untuk menganalisis dampak dari strategi polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015 hingga 2017.

#### **1.3.2 Manfaat penelitian**

1. Bagi penulis: penelitian ini dapat digunakan tidak hanya sebagai bahan referensi untuk memperluas wawasan dan mengembangkan kreativitas penelitian ilmiah, tetapi juga sebagai referensi komparatif bagi peneliti lain.
2. Kontribusi akademis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015 hingga 2017, serta dapat memberikan sumbangan pada pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan imigrasi di Eropa.

3. Rekomendasi kebijakan: hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Polandia dalam menghadapi tantangan migrasi dimasa depan dan meningkatkan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani imigran.
4. Peningkatan kesadaran publik: penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang kompleksitas isu imigrasi dan strategi yang diterapkan oleh negara dalam menangani imigran. Hal ini dapat membantu mengurangi stereotip negatif dan meningkatkan pemahaman masyarakat dan ekonomi Polandia.
5. Dasar bagi penelitian selanjutnya: penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam bidang studi migrasi dan kebijakan kewargaan, baik di Polandia maupun di negara-negara lain, serta dapat membuka peluang penelitian lintas disiplin yang lebih luas.

Dengan tujuan dan manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami strategi Polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015-2017.

## **1.4 Metode penelitian**

### **1.4.1 Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan ini dimulai dengan data dan kemudian mengolahnya menjadi informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan

menganalisis strategi yang diadopsi oleh Polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015-2017.

#### **1.4.2 Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi literatur yang melibatkan pencarian, pemilihan dan sintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Ini melibatkan membaca dan menganalisis berbagai artikel, buku, dan jurnal. Studi literatur ini akan memberikan landasan teoritis dan pemahaman mendalam tentang konteks teoritis dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan strategi Polandia dalam menangani imigran.

#### **1.4.3 Jenis data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu jenis data yang bersifat sekunder, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain dan dapat digunakan ulang dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder dapat berupa literatur ilmiah antara lain buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan landasan teori terkait strategi Polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015-2017. dengan sumber data dari artiker, buku, dan jurnal.

#### **1.4.4 Analisis data**

Berdasarkan jenis data yang digunakan oleh penulis di atas adalah jenis data sekunder, maka teknik analisis data dalam penelitian ada beberapa tahap yaitu:



1. Mengumpulkan data dan mengorganisir data langkah tersebut dilakukan untuk fokus pada data yang di ambil dari berbagai sumber.
2. Membaca semua data yang sudah dikumpulkan merupakan langkah selanjutnya ketika data sudah terkumpul, hal ini diharapkan penulis mampu dapat menemukan sumber terkait dengan penelitian yang dilakukan.
3. Mengklarifikasi dan mengkategorisasi data yang merupakan metode untuk menyusun data secara sistematis.
4. Setelah itu data dihubungkan satu sama lain dengan mengguakan teori atau konsep yang telah disiapkan. Dari proses tersebut, maka akan menghasilkan sebuah pemahaman tentang fenomena yang di teliti.

## **1.5 Waktu dan lokasi penelitian**

Adapun waktu dan lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu:

### **1.5.1 Waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Agustus dan akan direncanakan selesai pada bulan oktober 2023.

### **1.5.2 Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten majene, provinsi sulawesi barat. Di perpustakaan universitas sulawesi barat serta melalui literatur yang ada di internet.

## **1.6 Sistematika penyusunan skripsi**

Pada bagian awal sistematika penyusunan skripsi ini di mulai dari sampul terlebih dahulu setelah itu akan di uraikan dalam beberapa bab, sistematika penyusunan dalam proposal ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I : pendahuluan, pada bab 1 ini berisi tentang latar belakang, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian , serta sistematika penyusunan skripsi.

Bab II : kajian teoritik dan telaah pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teoritik dan telaah pustaka yang menjelaskan tentang teori ataupun konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun teori ataupun konsep yang digunakan adalah kebijakan luar negeri dan Teori Foreign Policy Inputs.

Bab III : Data, pada bagian ini berisi tentang data data yang di anggap penting yang digunakan untuk menganalisis Apa dampak dari adanya strategi polandia dalam menangani imigran tahun 2015-2017, serta Bagaimana strategi polandia dalam menangani imigran tahun 2015-2017

Bab IV : pembahasan, pada bagian ini berisi analisis detail data berdasarkan teori yang telah dipilih sebelumnya.

Bab V : Penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang diperlukan

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK DAN TELAHAH PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian teoritik**

Adapun kerangka teori ataupun konseptual yang akan digunakan dalam penelitian yaitu adalah sebagai berikut:

##### **2.1.1 Teori kebijakan publik**

###### **1. Pengertian kebijakan publik**

Kebijakan publik adalah kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan fungsinya kepada masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah yang mengatur banyak aspek kehidupan masyarakat adalah kebijakan yang ditujukan untuk kebaikan publik (masyarakat). pengertian kebijakan adalah prinsip atau tindakan yang dipilih untuk memandu pengambilan keputusan. Penyusunan kebijakan publik diawali dengan perumusan masalah yang teridentifikasi. Setelah itu, dengan menerapkan kebijakan tersebut, tujuan untuk mengatasi masalah yang muncul di masyarakat.<sup>7</sup>

Istilah kebijakan publik digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan akademis seperti perkuliahan ilmu sosial politik, ekonomi dan hukum. Namun istilah tersebut juga dapat merujuk pada sesuatu yang lebih spesifik seperti, kebijakan Debirokratisasi dan deregulasi pemerintah. Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan (*policy*) digunakan dalam bisnis sehari-hari, tetapi sebagai pengganti aktivitas atau keputusan yang sama sekali berbeda. Istilah ini sering

---

<sup>7</sup> Mustari, N. (2015). *pemahaman kebijakan publik*. yogyakarta:leutikaprio

dikacaukan dengan tujuan, program, keputusan, kriteria, proposal, dan proyek besar. Tetapi sementara kebijakan publik mungkin tampak agak abstrak, atau seperti sesuatu yang terjadi pada individu, seperti yang ditunjukkan contoh di atas, pada dasarnya banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik.<sup>8</sup>

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*). khususnya dalam literatur ilmu politik, masing-masing defenisi tersebut memberi penekanan yang berbedabeda-beda. Hal ini disebabkan karena kebanyakan defenisi dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin ditelaah oleh seorang analisis kebijakan. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Disisi lain. Pendekatan dan model yang digunakan para ahli akhirnya menemukan bagaimana Kebijakan publik tersebut hendak didefenisikan kebijakan publik ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang sama, yang berbeda adalah bagaimana respons terhadap masalah tersebut respon ini yang disebut sebagai kebijakan publik. Dan karena kebijakan publik adalah domain dari negara, maka kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk memanjajeni kehidupan bersama yang disebut bangsa dan negara.<sup>9</sup>

Menurut mustopadidjaja sistem kebijakan publik adalah keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan hubungan di antara 4 elemn yaitu masalah kebijakan publik, pembuat kebijakan publik,

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.3

<sup>9</sup> *ibid*

kebijakan publik dan dampaknya terhadap kelompok sasaran. Sistem kebijakan publik dikenal adanya unsur-unsur input, proses dan output:

- a. Input: masalah kebijakan publik, masalah kebijakan publik ini timbul karena adanya faktor lingkungan kebijakan publik yaitu suatu keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang tersebut, yang berupa tuntutan, keinginan-keinginan masyarakat atau tantangan dan peluang yang diharapkan segera diatasi melalui suatu kebijakan publik. Masalah itu dapat juga timbul justru karena dikeluarkannya suatu kebijakan publik baru.
- b. Proses pembuatan kebijakan publik: proses pembuatan kebijakan publik itu bersifat politis, dimana dalam proses tersebut terlibat berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda, bahkan ada yang saling bertentangan
- c. Output: kebijakan publik yang berupa serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu seperti yang diinginkan oleh kebijakan publik.
- d. Impact (dampak), yaitu dampaknya terhadap kelompok sasaran, kelompok sasaran adalah kelompok-kelompok orang atau organisasi-organisasi yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi atau diubah oleh kebijakan publik tersebut.<sup>10</sup>

Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karenanya, apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat pada masa yang akan datang. Oleh sebab itulah, sangat dibutuhkan kehati-hatian yang lebih dari para pembuat kebijakan(policy maker) ketika akan melakukan formulasi

---

<sup>10</sup> Bintoro dan mustopadidjaja 1998 elemen-elemen sistem kebijakan publik. Jakarta: gunung agung

kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan pengembangan alternatif-alternatif kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah yang telah masuk dalam agenda politik. Untuk bisa memahami proses formulasi kebijakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah perlunya memahami aktor-aktor yang terlibat atau pemeran dalam proses perumusan kebijakan, baik aktor-aktor yang resmi maupun yang tidak resmi.

Menurut Pearsons secara metodologis, melakukan klarifikasi pendekatan atau model kebijakan publik pada lima pendekatan antara lain:

1. Pendekata/model kekuasaan
2. Pendekatan/model rasionalitas
3. Pendekatan pilihan publik
4. Pendekatan personalitas
5. Pendekatan kognisi dan informasi

Adapun beberapa macam model formulasi kebijakan publik yaitu:

1. Model rational-comprehensive
2. Teori incrementalism
3. Teori (*mixed scanning theory*) pengamatan terpadu
4. Model institusional
5. Mode elit-massa
6. Model kelompok
7. Model sisitem politik<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Fadilla, P. 2003, paradikma kritis dalam studi kebijakan publik. Yogyakarta: pustaka pelajar

Formulasi kebijakan sebagai suatu proses dapat dipandang dalam dua macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan adalah:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu<sup>12</sup>

Implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Defenisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>13</sup> Pengertian kegagalan kebijakan kedalam dua kategori yaitu non implementation dan unsuccessful implementation. Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara

---

<sup>12</sup> Nigro, A dan lidya, G. 1984. modern publik administration, new york: harper international edition

<sup>13</sup> Wahab, S.A. 1997. Analisis kebijakan: dari formulasi implementasi kebijakan negara ed. 2. jakarta: bumi aksara

nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program peningkatan kualitas pendidik secara ideal yang telah dirancang sebelumnya. Suatu kebijakan implementasi pada umumnya satu paket dengan kebijakan pemantauan atau monitoring. Mengingat kebijakan implementasi adalah sama pelinknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan memengaruhinya.<sup>14</sup>

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur/proses siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu di evaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori(kebijakan) dengan praktiknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak.<sup>15</sup>

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Untuk dapat mengetahui outcome dan impact suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu misalnya lima tahun semenjak kebijakan itu di implementasikan, sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini maka outcome dan impact dari suatu kebijakan belum tampak. Evaluasi kebijakan merupakan proses mendapatkan gambaran tentang kebijakan publik dalam pelaksanaannya, alat yang

---

<sup>14</sup> Hogwood, B. W. dan Lewis A. G. 1984 policy analysis for the real world, oxford university press

<sup>15</sup> Nugroho, R. 2004. kebijakan publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta: media elex komputindo



dipakai dan tujuan-tujuan yang diberikan. Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.<sup>16</sup>

Tujuan pokok evaluasi adalah untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Adapun ciri-ciri dari evaluasi kebijakan publik yaitu:

1. Menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan
2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
3. Prosedur dapat dipertanggung jawabkan secara metodologi
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana perumusan atau kebencian
5. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan<sup>17</sup>

Faktor eksternal dapat memiliki pengaruh signifikan dalam perumusan kebijakan publik di suatu negara. Faktor-faktor eksternal ini mencakup berbagai elemen di luar batas negara yang dapat mempengaruhi kebijakan publik. Berikut beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perumusan kebijakan:

1. Tekanan internasional: tekanan dari negara-negara lain, organisasi internasional, atau aktor non-negara seperti LSM internasional dapat mempengaruhi

---

<sup>16</sup> Muhadjir, 1996 metodologi penelitian kualitatif edisi 3. Yogyakarta: rake sarasin

<sup>17</sup> Nugroho, R. 2008 public policy. Jakarta: pt elex me-dia komputindo

perumusan kebijakan. Contohnya, sanksi ekonomi atau tekanan diplomatik dari negara lain dapat mendorong suatu negara untuk mengubah kebijakan tertentu.

2. Isu global: isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, atau keamanan regional dapat memaksa negara untuk merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan dampak global.
3. Hubungan bilateral: hubungan bilateral antara negara-negara dapat memiliki dampak langsung pada perumusan kebijakan. Kesepakatan atau konflik bilateral dapat mempengaruhi pilihan kebijakan suatu negara.
4. Pengaruh ekonomi: kondisi ekonomi global, termasuk fluktuasi pasar keuangan, perdagangan internasional, dan kebijakan ekonomi negara-negara besar, dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan fiskal suatu negara.
5. Keamanan internasional: isu-isu keamanan internasional seperti terorisme, konflik bersenjata, dan keamanan siber dapat memaksa suatu negara untuk merumuskan kebijakan keamanan dan pertahanan yang relevan
6. Kehalalan internasional: norma dan nilai internasional, termasuk hak asasi manusia, demokrasi, dan perlindungan lingkungan, dapat mempengaruhi bagaimana suatu negara untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan standar internasional.
7. Krisis kesehatan global: krisis kesehatan global seperti pandemi dapat memaksa negara-negara untuk merumuskan kebijakan kesehatan publik yang melibatkan kerja sama internasional.

8. Bantuan dan investasi asing: bantuan pembangunan dan investasi asing dapat mempengaruhi prioritas kebijakan di negara penerima, terutama dalam hal pengembangan ekonomi dan sosial.
9. Perubahan teknologi: kemajuan teknologi dan konektivitas global dapat mempengaruhi kebijakan terkait keamanan siber, privasi data, dan inovasi.
10. Opini publik internasional: opini publik di negara lain, terutama dalam era media sosial, dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan suatu negara dalam perumusan kebijakan.

Faktor eksternal ini sering kali memaksa suatu negara untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya dengan tuntutan dan perubahan di dunia luar. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang faktor eksternal dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan global sangat penting dalam perumusan kebijakan publik<sup>18</sup>.

Untuk itu dalam teori kebijakan publik ini dapat menjadi kerangka teoritis yang relevan untuk menganalisis proses pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan imigrasi yang di tangani oleh polandia. Teori kebijakan publik membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan, peran aktor politik, interaksi pemangku kepentingan, serta dampak kebijakan tersebut terhadap penanganan imigran di polandia.

## **2.2 Telaah pustaka**

Telaah pustaka merupakan survei penelitian sebelumnya segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian peneliti. Tujuan dari telaah pustaka untuk

---

<sup>18</sup> Waltz, K. N. 1979 theory politic international. Amerika: Addison-wesley

mengetahui perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya untuk dapat mempertimbangkan kebenaran penelitian dan menghindari unsur-unsur plagiat. Penulis menemukan bahwa beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang saat ini diteliti oleh penulis. Berikut beberapa penelitian sebelumnya:

Penelitian sebelumnya yang pertama berjudul *The International Migration and Foreign Policy Nexus: the Case of Syrian Refugee Crisis and Turkey*, yang ditulis oleh N. Ela Gokalp Aras dan Zeynep Sahin Mencutek.<sup>19</sup> Artikel ini membahas bagaimana reformasi kebijakan luar negeri Turki yang telah memengaruhi krisis pengungsi Suriah, yang telah membuka jalan menuju kebijakan imigrasi.<sup>20</sup> Kebijakan Turki dalam menanggapi krisis pengungsi Suriah mencerminkan keberangkatan yang signifikan dari situasi global, dengan kebijakan pertama Turki untuk arus pengungsi Kurdi Irak pada tahun 1998 dan 1991. Turki telah mengadopsi kebijakan terbuka untuk pengungsi Suriah, menghindari perlindungan pengungsi. Migrasi dan pemberian tanggung jawab untuk ikut serta dalam gagasan mencari bantuan dari negara atau lembaga lain untuk menangani masalah pengungsi ini selama beberapa waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan soft power Turki. Selain itu, untuk mencapai tujuan politik luar negerinya yaitu berperan sebagai negara yang kuat di kawasan, serta membangun reputasi yang baik di mata dunia internasional sebagai aktor yang sangat penting dapat ikut serta dalam pelaksanaannya. Solusi untuk masalah manusia dan politik.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> N. Ela Gokalp Aras dan Zeynep Sahin Mencutek, (2015), *the international migration and foreign policy nexus*, jurnal the case of Syrian refugee crisis and turkey, migration letters, volume 12, no:3, 193-208.

<sup>20</sup> *ibid*, halaman 205.

<sup>21</sup> *ibid*, halaman 194.

Dalam menyelesaikan konflik suriah yang memaksa warga suriah meninggalkan tanah air mereka untuk menghindari konflik, turki telah mengadopsi kebijakan pintu terbuka tanpa kompromi. Awalnya, warga suriah yang memasuki wilayah turki dianggap sebagai pengungjung dan bukan pengungsi yang sah, meskipun tidak ada istilah seperti itu dalam hukum pengungsi internasional. Namun, karena jumlah pengungsi yang masuk ke negara itu meningkat, turki menetapkan keadaan aman sementara pada oktober 2011, seperti yang terjadi dalam menanggapi krisis pengungsi irak pada tahun 1991. undang-undang ini memungkinkan pengungsi suriah untuk menerima suaka sementara sampai mereka dimukimkan kembali dengan aman di negara ketiga. Perubahan tanggapan turki terhadap krisis pengungsi suriah disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pemerintah turki mulai kesulitan menangani masalah di dalam suriah tanpa kewenangan pemerintah suriah. Kedua, bantuan turki diberikan kepada pemerintah oposisi suriah sedemikian rupa sehingga tampaknya tidak diinginkan. Ketiga, kekhawatiran turki di perbatasan suriah tumbuh setelah banyak kematian.<sup>22</sup>

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Wisnu Ady Septian pada tahun 2018 dengan judul *Analisis pengambilan keputusan polandia dalam penolakan pengungsi masa pemerintahan Beata Szydlo* penelitian ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi keputusan polandia untuk menolak menerima pengungsi pada masa pemerintahan Beata Szydlo. Karena penelitian ini

---

<sup>22</sup>Ibid, halaman 204

menggunakan begitu banyak variabel yang di anggap penting, tentunya diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian yang komprehensif.<sup>23</sup>

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Brian Rizky Bimantara tahun 2018 dengan judul *inkonsistensi polandia dalam merespons krisis pengungsi di eropa* penelitian ini menjelaskan dua alasan utama mengapa polandia bertindak tidak konsisten dalam krisis pengungsi eropa. Pertama, perbedaan identitas antara orang polandia dan pengungsi. Kedua, keberhasilan proses pengungsi mengakibatkan kurangnya insentif untuk perubahan rumah tangga.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Septian.W.A.(2018).analisis pengambilan keputusan polandia dalam penolakan pengungsi pada masa pemerintahan beata szdylo,malang:universitas brawijaya

<sup>24</sup> Bimantara, B.R.(2018). *inkonsistensi polandia dalam merespons krisis pengungsi di eropa*, surabaya:univeristas negeri sunan ampel

## BAB III

### GAMBARAN UMUM

#### IMIGRAN DI POLANDIA

Pada bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum migrasi di Eropa dan Polandia sebagai negara pengirim migran di kawasan Eropa. Fenomena migrasi manusia telah ada setua peradabannya. Pada masa itu, migrasi manusia dilatarbelakangi alasan perubahan lingkungan dan iklim. Sedangkan perkembangan faktor pendorong dan penarik terjadinya migrasi pada masa sekarang dapat dilihat dari keinginan migran untuk melepaskan diri dari tekanan politik, agama, budaya, serta himpitan ekonomi.<sup>25</sup>

Untuk mengetahui perkembangan migrasi manusia, khususnya di Eropa penulis akan menyampaikan secara singkat sejarah imigran di Eropa dan Polandia di dukung dengan beberapa referensi yang berkaitan dengan isu temuan yang dikemukakan oleh Hein de Haas dalam hasil penelitiannya yang berjudul *European Migrations: Dynamics, Drivers, and the Role of Politicies*,<sup>26</sup>

### 3.1 Sejarah Imigran di Eropa Dan Polandia

#### a. Sejarah Migrasi Eropa

Migrasi pekerja dan pengungsi telah menjadi bagian dari sejarah kawasan Eropa. Di antara negara-negara dengan sejarah kolonial, migrasi menjadi isu utama

---

<sup>25</sup> Hughes, H (2023,09 28). *immigrants, refugess, and asylum seekers: A Global View, the center for independent studies policy monogrhapy* di akses dari <http://www.cis.org.au/upload>.

<sup>26</sup>Haas. D.H, (2023, 09 28). *europaen migrations: dynamics, drivers, and the role of policiees, publication office of the europaen union luxembourg* di akses dari <http://publications.jrc.ec.europaen.eu/repository/handle>

beriringan dengan kebebasan bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pada masa tahun 1950-1970an, negara-negara Eropa secara lebih jauh menyaksikan bagaimana terjadinya migrasi tenaga kerja yang masif dari kawasan selatan Eropa, seperti Turki dan Afrika Utara, walaupun pada masa ini, migrasi berkaitan dengan permintaan dan suplai tenaga kerja, bukan tentang tantangan sosial dan lainnya. Kemudian, setelah terjadinya topik perdebatan, sampai pada dekade-dekade selanjutnya.<sup>27</sup> Untuk melihat dinamika migrasi di Eropa, penulis menguraikan beberapa data yang menunjukkan fase-fase perkembangan migrasi di Eropa dari masa ke masa. Keempat fase tersebut erat kaitannya dengan perubahan ekonomi dan seiringan perubahan dalam ideologi ekonomi, perubahan struktur permintaan tenaga kerja Eropa, perubahan demografi, serta proses integrasi dan perluasan kawasan Eropa. Sebelumnya, akibat pengaruh dari dekolonisasi, perubahan demografi, pesatnya pertumbuhan ekonomi, serta pembentukan Uni Eropa sebagai zona bebas perdagangan dan migrasi, memunculkan Eropa sebagai tujuan utama migrasi global.<sup>28</sup>

Pada fase pertama antara tahun 1945 sampai 1970, perusahaan-perusahaan berkala besar memfokuskan investasi pasca perang dan ekspansi produksi di negara-negara maju Eropa. Sebagian di antaranya di bantu dengan program *US Marshal* yang kemudian menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta peningkatan kekurangan tenaga kerja berketerampilan rendah disamping juga akibat perubahan demografi dan peningkatan tingkat pendidikan berkontribusi pada penurunan suplai tenaga kerja domestik. Hasil yang ditimbulkan dari hal tersebut

---

<sup>27</sup> Doomenrik, J.& Callejo, B. M. (2023 09 28). *national immigration and integration policies ini europe since 1973*. di akses dari <https://link.springer.com.content>.

<sup>28</sup> Ibid



adalah perekrutan besar-besaran tenaga kerja migran dari negara yang relatif kurang maju dari kawasan mediterania pada saat itu. Selain dari negara seperti Irlandia, Finlandia ke negara Eropa barat sebagai basis industri seperti Jerman barat, Swiss, Italia bagian utara, Belgia, Austria, Perancis, Belanda, Inggris, Denmark, Swedia dan Luxembang. Kemudian dari tahun 1960an, terjadi transisi migrasi di negara-negara tersebut dikarenakan penuaan dan pertumbuhan ekonomi, perekrut dari negara-negara seperti Jerman, Belgia, Perancis dan Skandinavia mulai meningkatkan perekrutan tenaga kerja dari Maroko, Turki, Tunisia, Aljazair, dan juga dari beberapa negara bekas koloni seperti Mali dan Senegal ke Perancis, Karibia ke Inggris.<sup>29</sup>

Akhir dari fase ini ditandai dengan krisis minyak tahun 1973, yang kemudian membekukan perekrutan juga sebagai awal dari serangkaian resesi ekonomi sampai memasuki tahun 1980an. Bersama dengan jatuhnya tingkat kelahiran, dan juga peningkatan biaya tenaga kerja di negara-negara kaya, mendorong restrukturisasi ekonomi global, melibatkan investasi modal pada area industri baru di negara berkembang, mengubah pola perdagangan dunia, serta pengenalan teknologi-teknologi baru. Kemudian dilanjutkan dengan fase ke dua antara tahun 1970 sampai pertengahan 1990an. Fase ini bertepatan dengan suatu pemerataan kebijakan ekonomi neoliberal yang didominasi oleh deregulasi ekonomi, seperti fleksibelisasi pasar tenaga kerja dengan meningkatkan perekrutan sementara pekerja migran, pencabutan subsidi negara pada sektor-sektor seperti tambang, galangan kapal, dua industri berat, privatisasi perusahaan milik negara,

---

<sup>29</sup> Ibid

perpajakan yang kurang progresif, peningkatan ketimpangan ekonomi, serta pengikisan persial yang dipicu oleh pengaturan jaminan sosial.<sup>30</sup>

Beberapa perubahan dalam bidang politik dan ekonomi tersebut berkomunikasi pada pemecatan massal pekerja pabrik dan tambang, serta pekerja migran lainnya. Pada periode ini, produksi industri dialihkan ke negara-negara dengan tingkat upah rendah. Kembalinya pekerja dalam skala besar yang telah diantisipasi sebagai akibat dari pembekuan rekrutmen nyatanya tidak terjadi. Pekerja migran lebih memilih untuk menetap dan membawa serta keluarganya dikarenakan ketidakpastian umum serta kemungkinan penutupan perbatasan. Reuni keluarga dan pernikahan baru antara generasi kedua dan pasangan yang tinggal di komunitas asal adalah faktor penting dalam menjelaskan mengapa migrasi dari Maghreb, Turki, dan negara asal lainnya terus berlanjut pada tingkat yang relatif tinggi bahkan selama periode resesi. Namun, pengangguran massal dan segregasi berkontribusi pada marginalisasi jangka panjang atas bagian penting dan populasi imigran ini serta generasi kedua.<sup>31</sup>

Dari pertengahan 1980an, terjadi pertumbuhan ekonomi kembali. Perkembangan pesat di sektor agrikultur dan konstruksi tidak mengalami perubahan. Namun, dengan pergeseran ekonomi ke bidang jasa, permintaan pekerja di bidang industri yang tidak tumbuh, mengarah pada pengangguran jangka panjang para pekerja migran dengan keterampilan rendah. Perkembangan perbedaan cabang pasar tenaga kerja memicu kebutuhan kembali pekerja kasar di bidang agrikultur dan sektor jasa baik formal maupun informal. Hal ini juga termasuk peningkatan

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

permintaan pekerja rumah tangga wanita, dikarenakan pada saat itu terjadi peningkatan jumlah wanita yang memasuki angkatan kerja terampil. Ini memberikan dorongan lebih lanjut untuk lebih memfasilitasi mobilitas tenaga kerja intra-Uni Eropa. Meskipun hak untuk migrasi tenaga kerja bebas sudah diterapkan sejak 1968, salah satu tujuan utama dari perjanjian pembentukan bersama Uni Eropa dan gagasan kewarga negaraan Eropa, serta perluasan Uni Eropa adalah untuk mendorong mobilitas tenaga kerja bebas, yang umumnya dilihat pemerintah akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di negara tujuan dan negara asal.<sup>32</sup>

Fase ketiga ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 sekaligus sebagai tanda keruntuhan Uni Soviet dan komunis yang kemudian, memunculkan permintaan demokratis di Eropa Tengah dan Timur, sampai krisis ekonomi tahun 2008. dampak dari hal tersebut adalah terjadi percepatan migrasi sementara para pencari suaka yang mencari suaka di Eropa Barat. Periode ini merupakan periode di mana terjadi liberalisasi ekonomi bersama dengan masuknya Eropa Tengah dan Timur dalam area bebas migrasi Eropa. Fase ini juga menunjukkan terjadinya pembukaan perbatasan tenaga kerja baru di Eropa Tengah dan Timur, di antaranya Polandia, Rumania, Bulgaria, Ukraina, Albania, dan Republik Baltik. Negara-negara tersebut menjadi kawasan sumber baru migran bagi Eropa Barat dan Selatan. Kemudian juga menjadi negara transit dan imigrasi atas kehendak mereka sendiri. Periode ini juga ditandai dengan perkembangan ekonomi terbaru dan kemunculan tujuan migrasi baru di pinggiran Eropa Barat dan Selatan dimana Irlandia, Italia, dan Spanyol menarik banyak migran dari Eropa

---

<sup>32</sup> Ibid

Timur, Afrika Utara dan Barat, serta Amerika Latin. Hal ini merupakan perubahan penting dari periode sampai 1990, saat migrasi non-Uni Eropa didominasi migrasi dari Turki dan negara-negara Maghrib. Perkembangan ini bertetapan dengan kelanjutan integrasi Eropa, pembentukan zona Schengen dan penguatan bersama kontrol perbatasan eksternal UE. Pada 1990an, khususnya Spanyol dan Italia benar-benar menjadi negara tujuan migrasi. Kemudian yang terkini yaitu fase keempat yang dimulai dari tahun 2008 sampai sekarang. Fase ini ditandai dengan krisis ekonomi global pada tahun 2008 di mana terjadi setidaknya untuk sementara mengakhiri perkembangan dan perluasan ekonomi Uni Eropa, dan migrasi Eropa yang dikarakteristikan dengan konsolidasi dan stabilisasi migrasi intri-Uni Eropa dan kelanjutan imigrasi yang tinggi dan negara-negara non-UE.<sup>33</sup>

Efek dari krisis tersebut berdampak pada migrasi dalam internal Uni Eropa dan migrasi dari negara non UE seperti Yunani, Spanyol, Portugal dan Irlandia yang menunjukkan peningkatan emigrasi. Hal ini yang kemudian menyebabkan peningkatan migrasi *South-north* dengan pergerakan orang-orang Spanyol, Portugis, dan Italia ke bagian utara Eropa. Antara tahun 2007 sampai 2012 terjadi penurunan migrasi di negara-negara Uni Eropa. Pada tahun 2012, migrasi legal permanen dari negara ke tiga ke Eropa relatif lebih sedikit daripada ke Amerika Serikat. Berawal dari tahun 2012, dan khususnya sejak 2015, migrasi baik intra-UE (Timur, Barat, dan juga, sampai batas tertentu, Selatan Utara) dan migrasi luar UE terulang, terutama sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang membaik dan pengangguran yang menurun di Eropa utara dan barat. Pada tahun 2015 total

---

<sup>33</sup> ibid

migrasi intra UE adalah 1,4 juta sementara total migrasi legal dari negara-negara non UE seperti Syria dan lainnya adalah 2,4 juta. Sejak tahun 2015, perdebatan migrasi di Eropa semakin didominasi oleh peningkatan migrasi pengungsi dari Suriah dan negara lainnya yang memasuki Turki kemudian Yunani masuk Turki kemudian Yunani memasuki kawasan Eropa, *boat migration*, dan penyelundupan dari Afrika Utara. Haas menyampaikan bahwa meskipun hal tersebut seolah merupakan fenomena baru, namun migrasi kapal *trans Mediteranean* telah dimulai 1991 dan mengalami peningkatan pada beberapa dekade terakhir sebagai akibat dari pengetahuan serta pengawasan imigrasi dan perbatasan. Haas juga menyampaikan data tentang jumlah pencari suaka yang datang ke Eropa, di mana presentasi sebesar 25% mewakili pencarian suaka berkebangsaan Suriah, dan 16% Afghanistan. Sebanyak 440.000 aplikasi suaka sudah terdaftar dan lebih dari 1 juta masih dalam tahap pra-pendaftaran. Kemudian semenjak tahun 2016, terjadi penurunan jumlah aplikasi suaka seiring dengan peningkatan pengawasan perbatasan, serta secara relatif terjadi pengurangan insentitas konflik di negara asal.<sup>34</sup>

#### **b. Sejarah Migrasi Polandia**

Hampir selama abad ke-20, Polandia merupakan negara pengirim, baik pengungsi, maupun migran secara umum. Dihadapkan dengan kelambatan laju ekonomi, serta kehancuran yang diakibatkan perang, lebih dari satu juta migran Polandia bermigrasi untuk mencari kesejahteraan di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Seperti negara-negara di kawasan timur Eropa, pemerintahan Polandia

---

<sup>34</sup> ibid

menjalankan pendekatan isolasi dalam kebijakan migrasinya, mengawasi dengan ketat baik emigrasi maupun imigrasi, serta secara masif membatasi penerimaan suaka kepada negara lain yang menghadapi perjuangan kelas, seperti Vietnam.<sup>35</sup>

Kemudian pada tahun 1990an, mulai terjadi perubahan terkait kebijakan-kebijakan tersebut sebagaimana Polandia melakukan liberalisasi ekonomi, serta dalam upayanya mensejajarkan dengan Eropa Barat, pemerintah Polandia membentuk suatu aturan suaka selaras dengan standar internasional dan konvensi 1951 mengenai pengungsi. Individu-individu dari negara-negara bekas Uni Soviet, Afghanistan, Somalia, dan lain-lain mulai mencari suaka di Polandia. Pada saat itu pula, pemerintah Polandia memosisikan dirinya sebagai dermawan terhadap warga Bosnia dan Republik Ceko. Perubahan terbesar pada profil migrasi Polandia beriringan dengan akses Polandia kepada Uni Eropa pada tahun 2004 dengan adanya kebebasan mobilitas bagi warga negara anggota. Dalam kurun waktu dua tahun lebih dari 264.000 warga Polandia telah mendapatkan persetujuan bekerja di Inggris. Hingga tahun 2015, diperkirakan sebanyak satu sampai dua juta warga Polandia tinggal di negara anggota Uni Eropa lain.<sup>36</sup>

Perbedaan sikap Polandia antara kesediannya dalam mendukung kebebasan mobilitas Uni Eropa sebagai suatu keuntungan, khususnya terkait migrasi tenaga kerja, dengan ketidaksiannya Polandia untuk berbagi beban untuk membantu pengungsi yang datang ke Eropa memberikan label Polandia sebagai negara bermuka dua. Kritik tersebut muncul dikarenakan dengan pengalaman Polandia

---

<sup>35</sup> Bachaman, B. (2023 09 28). *Diminishing solidarity: polish attitudes toward the european migration and refugee crisis, migration policy institute*. Di akses dari <https://www.migrationpolicy.org/article/diminishing-solidarity-polish-attitudes-toward-european-migration-and-refugee-crisis>.

<sup>36</sup> Ibid

sebagai negara dengan sejarah migrasi, diharapkan akan lebih baik menunjukkan simpatinya terhadap keadaan pengungsi. Namun, pemerintahan Polandia mengesampingkan hal tersebut dan fokus untuk melakukan apa yang dianggap terbaik untuk negaranya.<sup>37</sup>

Berkaitan dengan hubungan antara Polandia dan migrasi, terdapat suatu hal yang menarik yang akan penulis bahas pada bab ini. Ketika Polandia secara resmi menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004, hanya tiga negara anggota Uni Eropa yang membuka secara langsung pasar tenaga kerja mereka bagi warga kebangsaan Polandia. Ke tiga negara tersebut adalah Inggris, Swedia, dan Irlandia. Kemudian pada akhir tahun 2006, warga Polandia dapat bekerja dengan bebas juga di Yunani, Portugal, Finlandia, Italia, dan Spanyol.<sup>38</sup>

Perkembangan pesat ekonomi Eropa pada tahun 2000an seolah menjadi ruang bagi warga Polandia sebagai tenaga kerja di negara-negara Uni Eropa lainnya. Kebanyakan dari mereka berangkat ke Inggris dan Irlandia di mana di sana perkembangan ekonomi di sektor konstruksi dan pelayanan sedang pesat. Selain itu, Norwegia dan Belanda juga menjadi tujuan atas pertumbuhan ekonomi dan runtuhnya penghalang imigrasi.<sup>39</sup> Kementerian Luar Negeri Polandia memperkirakan sekitar 15 sampai 16 juta diaspora Polandia, termasuk di dalamnya seseorang tinggal di luar negara yang memiliki kewarganegaraan atau keturunan Polandia. Berikut negara-negara dengan populasi warga Polandia terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Pada tahun 2008, survei yang

---

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Lglicka, K. & Skrzypczak, Z. M. (2023 09 28). *EU Membership highlights poland's migration challenges, migration policy institute*. Di akses dari <https://www.migrationpolicy.org/article/eu-membership-highlights-polands-migration-challenges>.

<sup>39</sup> Ibid

dilakukan oleh biro sensus Amerika Serikat menunjukkan data perkiraan populasi warga Polandia di Amerika Serikat sekitar 478.569 jiwa. Negara bagian dengan populasi warga Polandia diantaranya, Illinois, New York, Connecticut, Florida, dan New Jersey. Imigran Polandia di berbagai sektor seperti manufaktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial, kemudian konstruksi, manajemen, administratif, dan lain sebagainya. Statistik imigrasi tahun 2009 yang diterbitkan oleh *The U.S. Department of Homeland Security's* dilaporkan bahwa 119.271 orang Polandia memperoleh status warga permanen Amerika Serikat antara tahun 2000-2009.<sup>40</sup>

Di Jerman, menurut *Central Register on Foreigners of the German Federal Statistik Office*, sebanyak 398.813 warga Polandia terdaftar di Jerman pada akhir Desember 2009, 3,8% dari mereka lahir di Jerman. Warga Polandia terdiri atas 6% dari semua warga negara asing di Jerman dan merupakan kelompok terbesar ketiga setelah warga Turki dan Italia. Diluar kewarganegaraan, sekitar 1,3 juta orang melaporkan memiliki latar belakang migrasi dari Polandia pada 2008, menurut *Microcensus Jerman 2008* latar belakang migrasi termasuk mereka yang lahir di luar negeri dan bermigrasi ke Jerman serta mereka yang lahir di Jerman dari imigran orang tua atau kakek-nenek. Kelompok ini terkonsentrasi di bagian barat dan selatan Jerman, khususnya negara bagian North Rhine-Westphalia. Kebanyakan dari mereka bekerja di bidang industri, perdagangan, transportasi, hotel dan restoran. Sekitar 10% dari imigran Polandia merupakan lulusan pendidikan tinggi, sedangkan 6% di laporkan tidak bekerja. Di Inggris, sekitar 520.000 warga Polandia berada di Inggris pada Desember 2009 berdasarkan survei

---

<sup>40</sup> Ibid



populasi tahunan. Hal ini membuat Polandia sebagai negara sumber migran terbesar setelah India di Inggris, sekitar 20% imigran Polandia tinggal di London di mana mereka menempati posisi empat besar di antara kelompok yang lahir di luar negeri. Sebanyak 83,8% orang Polandia usia antara 16 sampai 64 tahun mempunyai pekerjaan.<sup>41</sup>

### 3.2 Faktor-Faktor Munculnya Imigran di Polandia

Munculnya imigran di Eropa dan Polandia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks. Faktor-faktor ini dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan dapat berhubungan dengan situasi global, regional, dan nasional. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi munculnya imigran di Eropa dan Polandia:

#### 1. Faktor-faktor munculnya imigran di eropa

a. Konflik dan perang: konflik bersenjata, perang saudara, dan kekerasan di berbagai negara dapat memaksa orang untuk melarikan diri dan mencari suaka di Eropa termasuk Polandia.<sup>42</sup>

b. Kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi: kondisi ekonomi yang buruk di beberapa negara dapat mendorong imigran untuk mencari pekerjaan dan peluang ekonomi yang lebih baik di Eropa termasuk Polandia.<sup>43</sup>

c. Perubahan iklim: perubahan iklim dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kelaparan, yang dapat memaksa orang untuk

---

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> UNHCR.(2020). *tren global pengungsi paksa pada tahun 2019* dalam [www.unhcr.org/globaltrends](http://www.unhcr.org/globaltrends)

<sup>43</sup> Organisasi internasional untuk migrasi (IOM).(2017). *migrasi dan agenda untuk pembangunan berkelanjutan*

mencari tempat yang lebih aman dan berkelanjutan di Eropa maupun di Polandia.<sup>44</sup>

d. Krisis kemanusiaan: krisis kemanusiaan, seperti krisis pengungsi suriah, dapat memaksa jutaan orang untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di Eropa termasuk Polandia.<sup>45</sup>

e. Perubahan demografi: struktur demografi suatu negara, termasuk tingkat kelahiran dan penuaan penduduk, dapat mempengaruhi kebijakan imigrasi untuk mengatasi perubahan dalam populasi.<sup>46</sup>

f. Pendidikan: beberapa imigran datang ke Eropa untuk mengejar pendidikan tinggi di universitas-universitas terkemuka. Ini dapat menciptakan keragaman budaya di institut pendidikan tinggi.<sup>47</sup>

g. Kerjasama internasional: kerja sama antara negara-negara Eropa dan lembaga-lembaga internasional dalam hal kebijakan imigrasi dan pengungsi dapat mempengaruhi arus imigrasi.<sup>48</sup>

## 2. Faktor-faktor munculnya imigran di Polandia

a. Krisis di negara tetangga: konflik dan ketidakstabilan politik di negara-negara tetangga Polandia, seperti Ukraina dan Belarusi, telah mendorong pengungsi dan imigran untuk mencari perlindungan atau peluang di Polandia.<sup>49</sup>

---

<sup>44</sup> IPCC. (2023 20 10). *laporan khusus: pemanasan global* dalam <https://www.ipc.ch/2018/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global>

<sup>45</sup> Taruhan, A. & Collier, P. (2023, 20 10). *perlindungan mengubah sistem pengungsi yang rusak* dalam <https://doi.org/10.1186/s40878-019-0157-z>

<sup>46</sup> Coleman, D. (2008). *efek demografi dari migrasi internasional di Eropa*. Dalam R. Rotte & P. Stein (Eds). *kebijakan migrasi dan perekonomian: pengalaman internasional* pers universitas cambridge

<sup>47</sup> Asosiasi Universitas Eropa. (2023 20 10). *pertukaran pelajar global: kebijakan dan ide menuju 2020* dalam <https://www.eeas.europa.eu>

<sup>48</sup> Komisi Eropa. (2023 20 10). *fakta baru tentang migrasi dan suaka* dalam <https://commission.europa.eu>

<sup>49</sup> Persatuan negara-negara. (2023 20 10). *laporan situasi krisis ukraina* dalam <https://www.councilofeuropa.eu>

- b. Kebijakan imigrasi: kebijakan imigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah nasional, termasuk kebijakan suaka dan visa, dapat mempengaruhi jumlah dan jenis imigran yang diterima di suatu negara termasuk Polandia.<sup>50</sup>
- c. Ketegangan sosial dan integrasi: ketegangan sosial dan tantangan integrasi imigran dalam masyarakat Polandia adalah faktor yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap imigrasi.<sup>51</sup>
- d. Pendidikan: keberadaan universitas-universitas berkualitas di Polandia telah menarik mahasiswa internasional, yang berkontribusi pada pertumbuhan imigrasi pendidikan.<sup>52</sup>
- e. Keamanan dan kebijakan perbatasan: kebijakan Polandia terkait dengan pengawasan perbatasan dapat mempengaruhi arus migrasi.<sup>53</sup>
- f. Kerja sama internasional: kerja sama Polandia dengan organisasi internasional seperti Uni Eropa dapat mempengaruhi kebijakan migrasi dan mobilitas manusia.<sup>54</sup>
- g. Pekerjaan: Polandia menarik imigran dari negara-negara yang mencari pekerjaan di berbagai sektor, termasuk pertanian, konstruksi, dan perawatan kesehatan.<sup>55</sup>

---

<sup>50</sup> Jaringan migrasi eropa.(2023 20 10). *laporan tahunan EMN tentang migrasi dan suaka* dalam <https://home-affairs.ec.europa.eu>

<sup>51</sup> Czerniejewska, I. (2019). *integrasi migran di polandia: prestasi dan tantangan* tinjauan migrasi eropa tengah dan timur 8(2), 39-58.

<sup>52</sup> Laporan daya saing global(2023 21 10) forum ekonomi dunia dalam <https://www.weforum.org>

<sup>53</sup> Pusat internasional untuk pengembangan kebijakan migrasi (ICMPD). (2023 21 10). *kebijakan visa schengen efisiensi dan konsistensi*. Dalam <https://hme-affairs.ec.europa.eu>

<sup>54</sup> Badan uni eropa untuk hak-hak fundamental (FRA), (2023 22 10) *migrasi tantangan utama hak-hak fundamental*. Dalam <http://fra.europa.eu>

<sup>55</sup> Grabowska, M. & Slusarczyk, M. (2018). *migrasi internasional dan dampak pasar tenaga kerja di polandia* migrasi internasional 56(6) 62-76.

h. Integrasi kebijakan: upaya untuk mengintegrasikan imigran ke dalam masyarakat polandia dapat memberikan dampak yang signifikan pada adaptasi dan penyesuaian mereka.<sup>56</sup>

i. Kondisi ekonomi: kondisi ekonomi di Polandia dan negara-negara Eropa lainnya dapat mempengaruhi daya tarik bagi imigran yang mencari pekerjaan dan kesempatan ekonomi.<sup>57</sup>

Faktor-faktor ini seringkali saling terkait dan kompleks, dan mereka dapat memainkan peran yang berbeda dan munculnya imigran di berbagai negara Eropa. Pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor ini dapat membantu dalam pengembangan kebijakan imigrasi yang efektif dan respon yang berkelanjutan terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat Eropa dan Polandia.

### **3.3 Ancaman Adanya Imigran di Polandia**

Adanya imigran yang muncul di negara Uni Eropa dan Polandia di pengaruhi beberapa ancaman yang terkait dengan adanya imigran di Eropa dan Polandia adalah topik yang kompleks, dan kontroversial, yang seringkali melibatkan berbagai perspektif. Dalam hal ini juga penting untuk diingat bahwa imigrasi juga membawa manfaat, seperti kontribusi ekonomi dan keragaman budaya. Namun, beberapa orang mengidentifikasi beberapa potensi ancaman atau tantangan terkait imigrasi, termasuk berikut beberapa potensi ancaman yang mungkin timbul akibat adanya imigran di Eropa dan Polandia:

#### **1. Ancaman adanya imigran di Eropa**

---

<sup>56</sup> Kaczmarczyk, P. & Okolski, M. (2017). *migrasi dari ukraina ke polandia: migrasi tenaga kerja, migrasi transit atau sesuatu di antaranya?* Tinjauan migrasi eropa tengah dan timur6(2) 7-24

<sup>57</sup> Organisasi internasional untuk migrasi (IOM) (2023 22 10) dalam <https://indonesia.iom.int>

- a. Tekanan pada sumber daya publik: jumlah imigran yang tinggi dapat menempatkan tekanan pada sumber daya publik seperti perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan sosial dan ketidakpuasan masyarakat.<sup>58</sup>
- b. Tantangan integrasi: integrasi imigran ke dalam masyarakat lokal bisa menjadi tantangan. Jika tidak ada upaya yang mampu untuk melakukan integrasi sosial, ekonomi, dan budaya maka isolasi sosial dan budaya dapat terjadi.<sup>59</sup>
- c. Diskriminasi dan xenofobia: imigran sering menghadapi diskriminasi, rasisme, dan xenofobia. Hal ini dapat mengakibatkan ketegangan sosial dan bahkan tindakan kekerasan.<sup>60</sup>
- d. Ancaman terorisme: ada kekhawatiran bahwa beberapa individu atau kelompok teroris dapat masuk ke dalam aliran imigran. Hal ini memunculkan isu keamanan yang serius.<sup>61</sup>
- e. Perubahan politik: isu-isu imigrasi sering kali menjadi topik dalam terjadinya politik, dan kebijakan imigrasi yang dapat mengganggu stabilitas politik.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> Kastil, S. & Miller, MJ (2019). *era migras: pergerakan populasi internasional di dunia modern*. Edi kelima. Pers bola merah.

<sup>59</sup> Sisi, J. (2019). *politik imigrasi di eropa review tahunan ilmu politik* 22, 353-372

<sup>60</sup> Komisi Eropa. (2023 24 10). dampak imigrasi terhadap masyarakat Eropa dalam <https://affairs.ec.europa.eu>

<sup>61</sup> Joppke, C. (2019). *apakah multikulturalisme sudah mati?* Krisis dan kegigihan dalam negara konstitusi. *Pers politik* 56, 06

<sup>62</sup> Hatton, TJ, & Williamson, JG. (2005). *migrasi global dan ekonomi dunia: kebijakan dan kinerja dua abad*. Florida: Pers MIT

## 2. Ancaman adanya imigran di polandia

a. Perubahan demografi: imigrasi bisa mengubah demografi polandia, dan beberapa orang mungkin merasa bahwa perubahan ini mengancam identitas budaya mereka<sup>63</sup>

b. Ketegangan sosial: imigran yang datang dengan budaya dan bahasa yang berbeda dapat menciptakan ketegangan dalam masyarakat tidak dikelola dengan baik.<sup>64</sup>

c. Tekanan pekerjaan: banyaknya imigran yang masuk ke polandia dapat menimbulkan persaingan dalam pasar tenaga kerja, terutama di sektor-sektor tertentu. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi pekerja lokal<sup>65</sup>

d. Isu keamanan: seperti di banyak negara polandia, terdapat kekhawatiran terkait isu keamanan yang terkait dengan imigrasi, seperti potensi infiltrasi kelompok ekstremis atau intelijen.<sup>66</sup>

e. Isu kebijakan dan politik: kebijakan migrasi yang kontroversial dapat menjadi sumber ketidakpuasan politik dan mungkin mempengaruhi stabilitas politik.<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup> Gorny, A. & Grabowska-Lusinska, I. (2014). *polandia: negara imigran baru di uni eropa. I pers universitas amsterdam*

<sup>64</sup> Kaczmarczyk, P. (2018). *imigrasi dan pasar tenaga kerja di polandia: penyesuaian dan perspektif*, migrasi internasional 56(2) 25-41

<sup>65</sup> Organisasi internasional untuk migrasi (IOM). (2023 25 10). *migrasi di polandia: profil negara 2018 dalam* <https://indonesia.iom.int>

<sup>66</sup> Okolski, M.(2017). *polandia: negara imigrasi baru di eropa. Pers universitas eropa tengah.*

<sup>67</sup> Grabowska-lusinska, I. & Okolski, M.(2009). *kebijakan emigrasi dan imigrasi di negara-negara visergard.* Institut kebijakan migrasi

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bintoro dan Mustopadidjaja 1998 elemen-elemen sistem kebijakan publik. Jakarta: Gunung Agung
- Coleman, D. (2008). *efek demografi dari migrasi internasional di Eropa*. Dalam R. Rotte & P. Stein (Eds). *kebijakan migrasi dan perekonomian: pengalaman internasional* hlm 23-48 pers universitas: cambridge
- Eckert, Roland (2006) *culture or conflict? Migration, culture conflict and terrorism* dalam Frelich, Joshua D and Robert G. Gurett eds. *Migration culture conflict crime and terrorism* Burlington: Ashgate Publishing
- Fischer, F., Miller, G.J., & Sidney, M. S. (Eds.) (2007). *Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods*. Amerika: CRC Press
- Fadilla, P. 2003, *paradigma kritis dalam studi kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Griffin, N. (2022) *miami 1980 tahun hari-hari berbahaya*. Woyowiec: rumah penerbitan czame
- Gorny, A. & Grabowska-Lusinska, I. (2014). *polandia: negara imigran baru di uni eropa*. I pers universitas amsterdam
- Hampshire, J. (2023). *the politics of immigration*, cambridge: Polity Press
- Hill, M. (2019). *the publicity process*. New York: Routledge
- Hatton, T.J., & Williamson, J.G. (2005). *migrasi global dan ekonomi dunia: kebijakan dan kinerja dua abad*. Florida: Pers MIT
- Hogwood, B. W. dan Lewis A. G. 1984 *policy analysis for the real world*, Oxford University Press
- Mustari, N. (2015). *pemahaman kebijakan publik*. Yogyakarta: Leutikaprio
- Muhadjir, 1996 *metodologi penelitian kualitatif edisi 3*. Yogyakarta: Rake Sarasin

Nigro, A dan lidya, G. 1984. modern publik administration, new york: harper international edition

Nugroho, R. 2004. kebijakan publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta: media elex komputindo

Nugroho, R. 2008 public policy. Jakarta: pt elex me-dia komputindo

Okolski, M.(2017). *polandia: negara imigrasi baru di eropa*. Pers universitas eropa tengah.

Pffeifer,christian michael windzio & matthias kleiman (2006) *media evil and society media use and its impact on crime peception sentencing attitudes and crime policy in germany* freilich, joshua d. & rob t. gurette eds migration culture conflict crime and terrorism burlington:pilishing

Reich,kerstin (2006) *immigration and juvenile delinquency in germany* dalam freilich, joshua d. dan rob t gurette eds. Migration culture conflict, crime and terrorism burlington: ashgate publishing

Sabatier,P,A.(2007). *theories of the policy process*. Amerika: westview press.

Wahab, S.A. 1997. Analisis kebijakan: dari formulasi inplementasi kebijakan negara ed. 2. jakarta: bumi aksara

Waltz, K. N. 1979 theory politic international. Amerika: Addision-wesley

### **Jurnal:**

Anandita, R., Safitri, A.F, Safitri, D, Amalia, R. (2018). Diferensi kebijakan polandia dalam menghadapi migran ekonomi dan pengungsi. Jurnal hubungan internasional

Brian white, A,A.Banyu perwita, yanya mochamad yani(1997),*issues in world politics*, jurnal pengantar hubungan internasional, 150.

Czerniejewska, I. (2019). *integrasi migran di polandia:prestasi dan tantangan* tinjauan migrasi eropa tengah dan timur 8(2), 39-58.

Fihel, A . and krstyna, I. 2018. the national policy on migration: poland in social integration and migration in europe, 215-239

Grabowska, M. & Slusarczyk, M. (2018). *migrasi internasional dan dampak pasar tenaga kerja di polandia* migrasi internasional 56(6) 62-76.

Grabowska-lusinska, I. & Okolski, M.(2009). *kebijakan emigrasi dan imigrasi di negara-negara visergard*. Institut kebijakan migrasi



Grabowska, B. (2019), *krisis migrasi dan aturan hukum: polandia dan hungaria di dalam uni eropa* jurnal studi etnis dan migrasi, volume 45 no:13 2557-2574.

Grabowska, B., & Jakimow, T. (2019). *negara-negara grup visegrad dan krisis migrasi: terperangkap di antara solidaritas dan kepentingan pribadi*. jurnal studi eropa kontemporer, volume 27 no:03, 351-377.

Grabowska-Lusunka, Izabel, and Krystyn 2017. *the polish immigration policy in the face of the european crisis* journal of international studies 10,1,138-147

Joppke, C. (2019). *apakah multikulturalisme sudah mati?* Krisis dan kegigihan dalam negara konstitusi. *Pers politik* 56, 06

Kaczmarczyk, P. & Okolski, M. (2017). *migrasi dari ukraina ke polandia: migrasi tenaga kerja, migrasi transit atau sesuatu di antaranya?* Tinjauan migrasi eropa tengah dan timur 6(2) 7-24

Kaczmarczyk, P. (2018). *imigrasi dan pasar tenaga kerja di polandia: penyesuaian dan perspektif*, migrasi internasional 56(2) 25-41

Kastil, S. & Miller, MJ (2019). *era migrasi: pergerakan populasi internasional di dunia modern*. Edisi kelima. *Pers bola merah*.

Muadin, S. (2016), *konsep kebijakan teori perumusan kebijakan publik*. *Jurnal review politik* vol 02 hal 1-10

N. Ela Gökçe Aras dan Zeynep Şahin Mencuntek, (2015), *the international migration and foreign policy nexus*, jurnal the case of Syrian refugee crisis and turkey, *migration letters*, volume 12, no:3, 193-208.

Szuleka, M. (2017). *kebijakan krisis dan migrasi pasca akses: kasus polandia*. jurnal studi internasional dan keamanan eropa tengah, volume 11 no:01, 55-74.

Sisi, J. (2019). *politik imigrasi di eropa* *review tahunan ilmu politik* 22, 353-372

Salt, J. (2018) *the migration crisis in europe: poland's policy response* the quarterly of international affairs 27,04, 109-132

#### **Tesis:**

Bimantara, B.R. (2018). *inkonsistensi polandia dalam merespons krisis pengungsi di eropa*, surabaya: universitas negeri sunan ampel

Baliciki, j(2021) membela *eropa kristen melawan invansi islam?* Wacana politik dan agaman populis di polandia dalam konteks krisis migrasi di ue warsawa: uksw

Baliciki, j (2012) imigran dan pengungsi di uni eropa. Humanisasi kebijakan imigrasi dan suaka, warsawa:uksw

Septian.W.A.(2018).*analisis pengambilan keputusan polandia dalam penolakan pengungsi pada masa pemerintahan beata szdylo*,malang:universitas brawijaya

### Internet:

Asosiasi Universitas Eropa.(2023 20 10). *pertukaran pelajar global:kebijakan dan ide menuju 2020* dalam <https://www.eeas.europa.eu>

Bachaman, B. (2023 09 28). *Diminishing solidarity: polish attitudes toward the european migration and refugee crisis*, migration policy institute. Di akses dari <https://www.migrationpolicy.org/article/diminishing-solidarity-polish-attitudes-toward-european-migration-and-refugee-crisis>.

Bartyzel, dorota (2023 19 10) *poland in labour bind so bad it can't staff job-placement offices* bloomerg dalam <https://www.bloomerg.com/news/article/2018-04=05/poland-in-labor-bind-so-bad-it-can-t-staff-job-placement-aoffices>

Bachman, bart (2023, 19 10) *diminishing solidarity polish attitudes toward the european migration and refugee crisis* migration policy <https://www.migrationpolicy.org/article/diminishing-solidarity-polish-attitudes-toward-european-migration-and-refugee-crisis>

Badan uni eropa untuk hak-hak fundamental (FRA), (2023 22 10) *migrasi tantangan utama hak-hak fundamental*. Dalam <http://fra.europa.eu>

Doomenrik, J.& Callejo, B. M. (2023 09 28). *national immigration and integration policies in europe since 1973*. di akses dari <https://link.springer.com/content>.

Dewan menteri (2023 23 10) kebijakan migrasi polandia dalam warszwa.<http://www.msw.gov.pl>

Eurostat, (2017, 03, 04). *migrant crisis:migration to europe explained in seven charts*. Di akses pada 21 oktober 2022 dari <http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>

European commission, (2023 18 10)*eures the european job mobility portal labour market information* european commission dalam <https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?cald=2789&countryid=pl&acro=imi&lang=en&regionald=plo&nuts2code=%20&nuts3code=&regionname=national%20level>

Euronews, (2023, 19 10) *poland refuses middle eastern migrants* <http://www.euronews.com/2018/01/02/poland-refuses-mid-east-migrants>

Hughes, H (2023,09 28). *immigrants, refugees, and asylum seekers: A Global View, the center for independent studies policy monography* di akses dari <http://www.cis.org.au/upload>.

Haas. D.H, (2023, 09 28). *European migrations: dynamics, drivers, and the role of policies, publication office of the European Union Luxembourg* di akses dari <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle>

Harper, jo (2023, 18 10) *poland fears economic hit as ue open door to ukrainian's deutsche welle* dalam <http://www.dw.com/en/poland-fears-economic-hit-as-ue-opens-door-to-ukrainas/a=42367763>

Iglicka, krystyna & magdalena ziolek-skrzypczak, (2023 18 10) *eu membership highlights poland's migration challenges migration policy institute* dalam <https://www.migrationpolicy.org/article/eu-membership-highlights-polands-migration-challenges>

IPCC. (2023 20 10). *laporan khusus: pemanasan global* dalam <https://www.ipcc.ch/2018/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global>

Jaringan migrasi eropa.(2023 20 10). *laporan tahunan EMN tentang migrasi dan suaka* dalam <https://home-affairs.ec.europa.eu>

Klimowicz, j (2023 20 10) *pengungsi di perbatasan pembela hak asasi manusia yezidi mengimbau perempuan dan laki-laki polandia untuk menunjukkan kebaikan dalam krisis kemanusiaan gazeta wyborcza* <https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,27694534.uchodzy-na=granicy-jez-ydzki-aktywista-apeluje-do-polek-i-polakow.html>

Koper, dan florkiewicz, (2023 19 10) *poland faces labour shortage for ue-funded* dalam <https://uk.reuters.com/article/ferrovial-budimex-infrastructure-work-in-2018-2020-ceo-idukl8n1v28t>

Komisi Eropa.(2023 20 10). *fakta baru tentang migrasi dan suaka* dalam <https://commission.europa.eu>

Komis eropa. (2023 24 10). *dampak imigrasi terhadap masyarakat eropa* dalam <https://-affairs.ec.europa.eu>

Iglicka, K. & Skrzypczak, Z. M. (2023 09 28). *EU Membership highlights poland's migration challenges, migration policy institute*. Di akses dari

<https://www.migrationpolicy.org/article/eu-membership-highlights-polands-migration-challenges>.

Laporan amnesty international polandia (2023 20 10) *kekejaman bukannya belas kasihan di perbatasan dengan belarus 11/14* <https://amnesti.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/raport-amnesty-international-polska-okrucienstwo-zamiast-wspolczucia-na-granicy-z-bialoru-sia.pdf>

Laporan daya saing global(2023 21 10) forum ekonomi dunia dalam <https://www.weforum.org>

Organisasi internasional untuk migrasi (IOM).(2023, 21 10). *migrasi dan agenda untuk pembangunan berkelanjutan* dalam [www.iom-int.translate.org](http://www.iom-int.translate.org)

Organisasi internasional untuk migrasi (IOM) (2023 22 10) dalam <https://indonesia.iom.int>

Parstoday (2023 23 10) imigran irak dipulangkan dari perbatasan belarus-polandia dalam [https://parstoday.ir/id/new/middle\\_east-i110328-imigran\\_irak\\_dipulangkan\\_dari\\_perbatasan\\_belarus\\_polandia](https://parstoday.ir/id/new/middle_east-i110328-imigran_irak_dipulangkan_dari_perbatasan_belarus_polandia)

Persatuan negara-negara.(2023 20 10). *laporan situasi krisis ukraina* dalam <https://www.cosilium.eu>

Pusat internasional untuk pengembangan kebijakan migrasi (ICMPD). (2023 21 10). *kebijakan visa schengen efisiensi dan konsistensi*. Dalam <https://hme-affairs.ec.europa.eu>

Shah. Shakhil.(2023, 18 10) *labour shortage forces poland to open borders* emeging europe dalam <https://emerging-europe-.com/in-brief/labour-shortage-poland-to-open-borders>

Taruhan, A.& Collier, P. (2023, 20 10). *perlindungan mengubah sistem pengungsi yang rusak* dalam <https://doi.org/10.1186/s40878-019-0157-z>

UNHCR.(2023, 21 10). *tren global pengungsi paksa pada tahun 2019* dalam [www.unhcr.org/globaltrends](http://www.unhcr.org/globaltrends)